

Sikap Bangladesh Dalam Menanggapi Program UNHCR “United Nations Joint Initiative” Terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya (Periode 2006-2011)

Mery* dan Yessy Olivia*

Mery_iklima@yahoo.com

Abstract

This research explains Bangladesh's response about UNHCR's "United Nations Joint Initiative" in handling Rohingya refugees in Bangladesh. Bangladesh is now home to 29.016 Rohingyas. The refugees has caused social and economic problems for Bangladeshi government over 33 years. UNJI was proposed by UNHCR to help Rohingyas and Bangladeshis. Bangladesh refused UNHCR proposal because UNJI has caused security threat to the country of Bangladesh. That UNJI provide assistance to Refugees without care about what will happend to local people, it seen from the more dense the population, the strunggle for jobs, and food shortages. That means UNJI did not fully resolved the facing problem in Bangladesh.

Keywords: *Bangladesh, Refugees, UNJI, Socio-Economy, Security.*

Pendahuluan

Isu-Isu baru dalam hubungan Internasional khususnya mengenai isu keamanan mulai muncul dalam agenda internasional sejak beberapa dekade. Dimana kedatangan pengungsi etnis Rohingya ke negara Bangladesh sebagai pengungsi selama tiga gelombang tidak lagi merupakan isu kemanusiaan saja, melainkan merupakan potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri Bangladesh. Dalam menjelaskan permasalahan yang penulis teliti maka tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisa negara bangsa. Pada tingkat analisis ini, negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem internasional dan relatif memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.¹

Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di Barat, Myanmar di tenggara serta Teluk Bangla di Selatan dan merupakan negara miskin serta padat penduduk. Bangladesh merupakan salah satu negara tujuan tempat pengungsian yang hampir sebagian besar jumlah pengungsinya ialah berasal dari Myanmar yaitu etnis Rohingya. Hal ini terjadi karena adanya konflik sipil antara warga mayoritas Buddha dengan minoritas Muslim dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sejak awal 1978. Inilah alasan mengapa sebagian besar penduduk Rohingya memilih mencari tempat perlindungan baru dan meninggalkan Myanmar, dengan tujuan utamanya adalah negara Bangladesh, dan dikarenakan pula letak Bangladesh yang dekat dari Myanmar.²

* Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau Angkatan 2009

* Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.

¹Busroh, Abu Daud, SH., *ilmu Negara*, Cet.5, Jakarta : Bumi Aksara, 2008. hal.56-57

²K. C. Saha, *Learning From Rohingya Refugee: Repatriation To Myanmar* Diakses Dari : <http://Pi.Library.Yorku.Ca/Ojs/Index.Php/Refuge/Article/Viewfile/21203/19874> Tanggal.11/27/2012

Menurut laporan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) *Policy Development and Evaluation Service (PDES)* atau kebijakan pembangunan dan pelayanan evaluasi oleh badan komisaris tinggi negara khusus pengungsi, Bangladesh sudah mengalami tiga gelombang kasus pengungsi asal Myanmar. Gelombang pertama arus pengungsi terjadi pada tahun 1978 sampai tahun 1980, dengan total jumlah pengungsi 200.000 orang. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1991-92, dan sekitar 250.000 orang yang terlibat untuk kedua kalinya atau kembali menjadi pengungsi di Bangladesh, dan jumlah pengungsi Rohingya semakin meningkat.³ Gelombang ketiga terjadi pada tahun 2006-2010 dan jumlah pengungsi meningkat dari tahun ketahun. Awalnya untuk mengatasi masalah pengungsi yang berkepanjangan ini Bangladesh memerlukan bantuan dari Organisasi Internasional khusus menangani pengungsi yakni *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR).

Jauh sebelum masuknya pengungsi terbesar pertama (etnis Rohingya di Bangladesh) tepatnya tahun 1971, UNHCR telah melakukan hubungan baik dengan pemerintah Bangladesh dengan menangani kasus pengungsi pasca perang terpisahnya negara Bangladesh dengan India.⁴ Kemudian pada Mei 1993, UNHCR menandatangani perjanjian atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pemerintah Bangladesh. Perjanjian itu dibentuk atas dasar keterlibatan UNHCR dalam proses pemulangan kembali pengungsi sekitar 245.000 orang ke Myanmar pada gelombang kedua secara sukarela. Dalam MoU tersebut tidak dicantumkan tentang kerangka hukum yang jelas mendefinisikan peran masing-masing pihak yang bersangkutan.⁵ Namun, dilihat dari program-program yang telah dilakukan UNHCR serta tanggung jawabnya pada berbagai pihak menurut perlindungan bagi pengungsi menjadikan organisasi ini sangat diperlukan dalam menangani kasus pengungsi di Bangladesh. Oleh karena itu, MoU 1993 menjadi satu-satunya dasar hukum UNHCR untuk beroperasi lebih lanjut di negara Bangladesh.⁶

Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas beragama Islam yang bertempat tinggal di daerah Myanmar tepatnya Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, dan sekarang dikenal dengan provinsi Rakhine atau Rakhaing. Diperkirakan bahwa etnis Rohingya adalah keturunan campuran, menelusuri asal-usul mereka baik luar (Arab, Moor, Turki, Persia, Mogul dan Pathan) Bengali lokal dan Rakhine. Mereka berbicara versi Chittagonian, dialek regional Bengali yang juga digunakan secara luas di seluruh bagian tenggara Bangladesh.⁷ Setelah kemerdekaan Burma tahun 1948, umat Islam melakukan pemberontakan bersenjata berhasil menuntut sebuah negara otonom dalam Uni Burma. Ini mengakibatkan reaksi terhadap umat Islam yang menyebabkan penghapusan mereka dari sipil, pembatasan pergerakan mereka, dan penyitaan properti mereka.

³ Médecins Sans Frontières-Holland., *10 Years For The Rohingya Refugees In Bangladesh : Past, Present And Future*. March 2002. Pdf. Hal.11 Diakses dari : http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2002/rohingya_report.pdf. Tanggal 27/03/2013

⁴ UNHCR Activities Financed By Voluntary Funds: *Report For 1993-1994 And Proposed Programmes And Budget For 1995*. Asia And Oceania. 23 August 1994 Diakses dari : <http://www.unhcr.org/Cgibin/Texis/Vtx/Home/Opencpdfviewer.html?Docid=4dde69309&Query=Mou%20with%20bangladesh%201993>. (Hal.3)

⁵ Lihat *ibid.*, hal.4)

⁶ T.Morris, Angela Dan Ester. *States Of Denial : A Review Of Unhcr's Response To The Protected Situation Of Stateless Rohingya Refugees In Bangladesh*. 2011. Switzerland. Diakses dari : <http://www.unhcr.org/4ee754c19.pdf>. Tanggal 27/11/2012

⁷ *Ibid.* hal. 10

Masuknya pengungsi ke negara Bangladesh menyebabkan dampak negatif terhadap warga lokal, terhadap lingkungan dan infrastruktur lainnya dalam prakteknya. Kemudian di tahun 2006, organisasi UNHCR mulai berdiskusi dengan badan-badan PBB lainnya mengenai perumusan Inisiatif Bersama PBB atau UNJI yang akan memberikan pelayanan kepada pengungsi terdaftar dan masyarakat setempat. Manfaat UNJI itu sendiri ialah memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi para pengungsi khususnya yang tinggal di daerah kabupaten Cox Bazar, yang merupakan salah satu kabupaten termiskin di Bangladesh yang mengalami penurunan ekonomi 3% pertahun.⁸ UNJI terdiri dari UNHCR dan badan-badan PBB lainnya khususnya *The World Food Program* (WFP), *The United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *The United Nations Population Fund* (UNFPA). Untuk memperkuat program bersama ini, UNJI juga memperkuat hubungan dengan departemen pemerintah, terutama yang berhubungan dengan kesehatan, air, lingkungan, aksi sosial, dan pendidikan.⁹

Program UNJI ini terdiri dari empat komponen yaitu, meningkatkan pelayanan, meningkatkan mata pencaharian, mengurangi kerawanan pangan, serta meningkatkan tata kelola dan pengembangan kelembagaan.¹⁰ Program ini juga menetapkan target untuk memberikan hibah makanan 30 kilogram beras atau gandum perbulan untuk masing-masing perempuan miskin yang berada di kabupaten Cox Bazar dalam mendukung keluarga miskin melalui makanan untuk bekerja dan makanan untuk pelatihan. Namun secara resmi pada bulan Januari 2011, program bantuan UNJI ini ditolak oleh pemerintah Bangladesh. Pernyataan menolak program tersebut diperkuat dengan pernyataan dari pejabat Departemen Keuangan Bangladesh, yang beranggapan bahwa tujuan sebenarnya dari inisiatif PBB ini adalah untuk merehabilitasi pengungsi di kabupaten Cox Bazar, tapi program UNJI mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan bagi penduduk setempat.

Hasil dan Pembahasan

Respon Bangladesh Terhadap UNJI dalam Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya di Bangladesh dari Tahun 2006-2011

Pemerintah Bangladesh melakukan kerjasama untuk menangani masalah kedatangan pengungsi di negaranya. Seperti Organisasi Internasional, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang khusus menangani masalah pengungsi, dan juga bekerjasama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). UNHCR merupakan salah satu agen dalam tubuh keorganisasian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang muncul sebagai penerus dari *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA) dan *International Refugee Organisation* (IRO) sebagai organisasi perlindungan pengungsi sebelum UNHCR yang dibentuk oleh Liga Bangsa Bangsa (LBB). Kantor UNHCR bermarkas di Jenewa, Swiss dan terdiri dari 147 negara anggota di akhir tahun

⁸ Bangladesh. *The Silent Crisis*. Diakses pada: <http://www.refugeesinternational.org/policy/field-report/bangladesh-silent-crisis>. tanggal 13/05/2013

⁹ *Working Environment 2013 UNHCR Country Operations Profile-Chad*. Diakses dari : <http://www.unhcr.org/pages/49e45c226.html>. Tanggal 13/05/2013

¹⁰ Kaladan., *Bangladesh disallows 33-million dollar UN Rohingya project*. Diakses dari : <http://www.kaladanpress.org/news/134-news-2011/april-2011/3161-bangladesh-disallows-33-million-dollar-un-rohingya-project> tanggal 08/05/2013

2011.¹¹ Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan.¹² Menurut pasal 1 Statuta Kantor Komisi Tinggi, tugas utama UNHCR adalah memberikan perlindungan internasional pada pengungsi, dan mencari jalan keluar yang tahan lama bagi para pengungsi dan membantu pemerintah dalam memfasilitasi pemulangan pengungsi dengan sukarela, atau integritasi mereka ke dalam masyarakat berkewarganegaraan baru.¹³

UNHCR merupakan badan khusus dari PBB yang memiliki mandat dalam perlindungan terhadap pengungsi. Statuta UNHCR tahun 1950 dan Konvensi Jenewa mengenai status Pengungsi tahun 1951 hingga kini telah menjadi dasar kepedulian komunitas internasional terhadap isu pengungsi. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang pertama yang mencakup berbagai aspek terpenting dari kehidupan seorang pengungsi. Arti dari pengungsi itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi.¹⁴ Terjadinya pengungsi karena adanya bahaya, misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga terjadi bukan karena bencana alam (*non natural disaster*) atau sering disebut dengan bencana buatan manusia (*man-made disaster*) seperti konflik bersenjata, pergantian rejim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya.¹⁵ UNHCR telah hadir di Bangladesh sejak tahun 1978 yang merupakan gelombang arus pengungsi pertama. Sebelum itu, intervensi UNHCR sangat sederhana karena hukum yang mengatur tentang pengungsi di Bangladesh ini hanya sebatas perjanjian 1993 yang tak jelas tugas dari masing-masing pihak antara pemerintah dan UNHCR tersebut, dan tidak cukup dipublikasikan sehingga menyebabkan kegagalan untuk mendapatkan sejumlah data yang signifikan serta izin akses ataupun langkah-langkah dalam hal perlindungan pengungsi dan solusi.

Pada Tahun 2006 UNHCR mengeluarkan UNJI sebagai rancangan program yang bergerak dalam bidang penanganan kasus pengungsi di Bangladesh, tepatnya saat gelombang ketiga arus pengungsi di Bangladesh. Dimana pemerintah bersedia menerima bantuan teknis dan dukungan keuangan kepada masyarakat karena melihat kondisi masuknya pengungsi telah menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan infrastruktur lainnya. Sedangkan pelaksanaan program UNJI ini sendiri dilakukan oleh beberapa kelompok Organisasi Internasional yang selama ini sangat berkaitan penuh dalam penanganan kasus etnis Rohingya. Diantaranya ialah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *The World Food Program* (WFP), *The United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *The United Nations Population Fund* (UNFPA).

Manfaat UNJI itu sendiri ialah memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi para pengungsi khususnya yang tinggal di daerah kabupaten Cox Bazar, yang merupakan salah satu kabupaten termiskin di Bangladesh yang mengalami penurunan

¹¹ UNHCR. CONVENTION AND PROTOCOL: *Relating To The Status Of Refugees*. diakses dari : <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf> tanggal : 17/02/2013 (hal.5)

¹² UNHCR. *Tujuan UNHCR*. Diakses dari : <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4f71b.html> tanggal 21/02/2013.

¹³ UNHCR. STATUTE Of United Nations High Commissioner For Refugees. Diakses dari : <http://www.unhcr.org/3b66c39e1.html>. tanggal : 20/03/2013

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, 1995.

¹⁵ Malcom J. Proudfoot, *European Refugee: 1935-52 A Study in Forced Migration Movement*, London: Faber & Faber Ltd, 1957, hal.32.

ekonomi 3% pertahun.¹⁶ Untuk memperkuat program bersama ini, UNJI juga memperkuat hubungan dengan departemen pemerintah, terutama yang berhubungan dengan kesehatan, air, lingkungan, aksi sosial, dan pendidikan.¹⁷ Program UNJI terdiri dari empat komponen yaitu, meningkatkan pelayanan, meningkatkan mata pencaharian, mengurangi kerawanan pangan, serta meningkatkan tata kelola dan pengembangan kelembagaan.¹⁸ Meningkatkan pelayanan dalam bentuk programnya ialah melalui pendekatan pembangunan yang adil seperti dibangunnya sekolah pendidikan dasar untuk dapat dimanfaatkan terutama oleh populasi masyarakat setempat atau tuan rumah dan setiap pengungsi. Program ini juga menetapkan target untuk memberikan hibah makanan 30 kilogram beras atau gandum perbulan untuk masing-masing perempuan miskin yang berada di kabupaten Cox Bazar dalam mendukung keluarga miskin melalui makanan untuk bekerja dan makanan untuk pelatihan.

a. *The World Food Program (WFP)*

Dalam kerjasamanya untuk penanganan pengungsi, WFP bekerjasama membantu UNHCR dalam menangani pengungsi di Bangladesh. WFP atau biasa disebut dengan Program Pangan Dunia adalah lembaga kemanusiaan terbesar di dunia dalam memerangi kelaparan di seluruh dunia. WFP merupakan bagian dari sistem PBB dan didanai secara sukarela. WFP yang didirikan pada tahun 1961 ini mengejar visi dunia di mana setiap pria, wanita dan anak memiliki akses setiap saat untuk makanan yang dibutuhkan untuk hidup aktif dan sehat. Ada lima tujuan dari WFP yakni, menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian dalam keadaan darurat, mempersiapkan bantuan atau jaga-jaga bila terjadi keadaan darurat, memulihkan dan membangun kembali kehidupan setelah keadaan darurat, mengurangi kelaparan kronis dan kekurangan gizi di mana-mana, dan yang terakhir ialah memperkuat kapasitas negara untuk mengurangi kelaparan.¹⁹ Pelaksanaan program UNJI yang diprakarsai oleh UNHCR ini mulai berlangsung di tahun 2006.

Kerjasama UNHCR dengan WFP yang disebut dengan *Joint Assessment Mission* (JAM) sangat berperan penting dalam pelaksanaannya menangani pengungsi Rohingya. Di awal tahun 2006, WFP telah banyak melakukan berbagai prestasi yang sudah dicapai dalam meningkatkan kondisi untuk para pengungsi yakni :

1. Penampungan pengungsi semi permanen sedang diberikan kepada seluruh rumah tangga yang terdaftar dalam dua kubu.
2. Pengungsi dapat bergerak di luar kamp dengan lebih mudah dan tanpa rasa takut didenda.
3. Kepemimpinan camp, sebelumnya oleh sistem mahjees telah berubah menjadi sistem yang lebih demokratis.
4. Non distribusi jatah makanan sebagai hukuman telah dihentikan.

¹⁶ Bangladesh. *The Silent Crisis*. Diakses dari: <http://www.refugeesinternational.org/policy/field-report/bangladesh-silent-crisis>. tanggal 13/05/2013

¹⁷ *Working Environment 2013 UNHCR Country Operations Profile-Chad*. Diakses dari : <http://www.unhcr.org/pages/49e45c226.html>. Tanggal 13/05/2013

¹⁸ Kaladan., *Bangladesh disallows 33-million dollar UN Rohingya project*. Diakses dari : <http://www.kaladanpress.org/news/134-news-2011/april-2011/3161-bangladesh-disallows-33-million-dollar-un-rohingya-project> tanggal 08/05/2013

¹⁹ WFP. Diakses dari: <http://www.wfp.org/about> . (tanggal.11/08/2013)

5. Pemerintah Bangladesh setuju untuk pengenalan kurikulum nasional Bangladesh di sekolah-sekolah kamp.
6. Pengungsi mengalami kenaikan kesehatan, dimana terjadi penurunan yang signifikan dari insiden pengungsi yang terkena diare, infeksi kulit, dan malaria
7. Kegiatan keterampilan telah dilaksanakan untuk kedua pria dan wanita
8. Kualitas program pemberian makanan selektif telah sangat meningkat, malnutrisi akut global (GAM) telah berkurang dari 16,8% menjadi 8,6% dan program gizi telah menjadi lebih mengutamakan masyarakat.

b. *The United Nations Children's Fund (UNICEF)*

UNICEF Bangladesh bekerjasama dengan Pemerintah Bangladesh dan jumlah mitra utama. Para mitra termasuk badan-badan PBB lainnya, Bank Dunia dan *Asian Development Bank*, serta LSM internasional dan nasional, lembaga donor, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Dan program kerjasama (2006-2010) dengan alokasi dana 260 juta dolar, adalah komitmen bersama dan kemitraan antara Pemerintah dan UNICEF. Dalam hal ini UNICEF menyumbang sekitar 40-50 juta dolar per tahun untuk sektor pembangunan Bangladesh. Daerah Bangladesh dikenal sebagai daerah padat penduduk dan kesenjangan kemiskinan. Diperkirakan bahwa 5 juta orang tinggal di daerah kumuh. Akses pada layanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat sangat langka. Banyak anak-anak yang harus menjadi pekerja, diperkirakan sekitar 5 juta anak mulai dari usia 5 tahun sampai 14 tahun dalam kondisi bahaya. Kemiskinan adalah penyebab utama banyaknya pekerja anak. Hampir tidak ada kesempatan belajar pada anak-anak untuk bersekolah. Angka partisipasi sekolah dasar bersih adalah 93 persen untuk laki-laki dan 96 persen untuk anak perempuan. Namun angka putus sekolah sangat tinggi karena metode pengajaran yang buruk, ruang kelas penuh sesak, dan kurangnya dukungan.

Bangladesh merupakan salah satu tingkat tertinggi masalah pernikahan anak di dunia. Hampir dua pertiga dari remaja perempuan menikah dari usia 10 tahun sampai 19 tahun. Angka kematian ibu Bangladesh tetap tinggi karena jauh dari perawatan obstetrik darurat dan petugas yang kurang terampil. Sedangkan di bidang kesehatan, anemia adalah masalah kesehatan yang berat untuk anak-anak pra-sekolah dan wanita hamil. Fasilitas kesehatan menderita kekurangan pasokan dan staf yang berkualitas. Sebuah studi nasional yang didukung UNICEF pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa penyebab utama kematian di kalangan anak-anak berusia 1 sampai 4 tahun adalah pneumonia, malnutrisi, dan diare. Daerah Bukit Chittagong, di mana etnis minoritas membuat setengah dari populasi, menderita pengembangan yang lebih lambat pada tingkat rata-rata nasional. Hal ini terutama disebabkan oleh sejarah konflik sipil dan medan yang sulit. Secara keseluruhan cakupan air bersih hanya 74 persen karena terjadi kontaminasi arsenik air tanah secara alami. Penggunaan kakus meningkat, namun program dalam mempromosikan praktek kebersihan tetap dilakukan, terutama mencuci tangan yang tepat, tetap menjadi tantangan. Sampah merupakan masalah lingkungan yang muncul menjadi sangat penting untuk diperhatikan, khususnya di perkotaan daerah.

Perlu diketahui bahwa Bangladesh meratifikasi Konvensi Hak Anak pada Tanggal 2 September 1990, dan Protokol Opsional dua (6 September 2000). Hal ini juga meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (yang mulai berlaku pada tanggal 6 tahun 1984) dan perjanjian internasional lainnya. Sedangkan

perlu dicatat pula bahwa Bangladesh bukan merupakan pihak pada Konvensi berkaitan dengan Status Pengungsi, atau Protokol terkait. Pemerintah Bangladesh juga telah menetapkan sendiri tujuan yang ingin dicapai yakni pencapaian tujuan pembangunan milenium serta strategi penanggulangan kemiskinan. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Bangladesh bersama dengan UNICEF yakni berkaitan dengan bidang pemenuhan gizi, pendidikan dasar universal dan mengurangi angka kematian balita. Kerjasama dilakukan untuk memenuhi beberapa target untuk *Milenium Development Goals* (MDGs). UNICEF telah membantu meng-upgrade sekitar 191 fasilitas perawatan obstetrik darurat di tingkat kabupaten untuk menyediakan layanan dasar dan komprehensif. UNICEF dengan pemerintah fokus mempromosikan pendekatan komprehensif untuk pencegahan penularan orangtua ke anak dari HIV. Untuk meningkatkan status gizi, UNICEF mendukung intervensi untuk mencegah defisiensi mikronutrien, termasuk garam iodisasi, suplementasi vitamin A, suplementasi besi folat dan cacingan. Kegiatan ini meliputi Vitamin enam bulan A ditambah dengan kampanye yang mencapai hingga 18 juta anak di seluruh negeri. UNICEF juga memainkan peran utama dalam mempromosikan perubahan perilaku untuk meningkatkan gizi anak-anak dan perempuan, termasuk promosi praktek pemberian makan anak menyusui, bayi dan muda.

UNICEF bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pembangunan pada pemerintah didorong program yang disebut Pendidikan Dasar *Development Programme* Kedua (PEDP-II). PEDP-II bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan dasar bagi semua anak dalam negeri melalui peningkatan akses sekolah dasar, partisipasi dan penyelesaian. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan UNICEF bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak. Standar ini kualitas juga meluas ke sekolah-sekolah yang memiliki ruang kelas, buku teks dan metode pengajaran. Bangladesh telah membuat kemajuan pada dua sisi, yakni sanitasi dan air, tetapi rendahnya tingkat sanitasi dan arsen pencemaran air tanah masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Meskipun cakupan sanitasi masih rendah di 39 persen, jumlah orang buang air besar di tempat terbuka dan menggantung jamban (yang kosong langsung ke sumber-sumber air) telah dibelah dua sejak tahun 2003. UNICEF Bangladesh saat ini terlibat dalam intensif masalah kebersihan, sanitasi dan proyek perbaikan kualitas air yang pernah dilakukan di negara berkembang. Sanitasi, Pendidikan Kebersihan dan Pasokan Air di Bangladesh (shewa-B) proyek bertujuan untuk mencapai 30 juta orang dalam lima tahun (2007-2011). Tingkat rendah kemajuan dalam meningkatkan cakupan pasokan air mencerminkan situasi yang berlaku arsenik kontaminasi dangkal sumur tabung.²⁰

UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Bangladesh untuk mewujudkan komitmennya untuk universal pencatatan kelahiran tahun 2010. Hal ini akan membantu situasi bagi perempuan dan anak di Bangladesh, di mana akte kelahiran berdiri di 10 persen untuk anak-anak di bawah lima tahun.²¹ Penekanan sekarang menghubungkan pencatatan kelahiran dengan sistem kerja pendidikan, kesehatan dan sosial. UNICEF juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang Undang-Undang pencatatan kelahiran baru yang menghubungkan akte kelahiran dengan layanan lain, seperti memperoleh lisensi driver atau paspor. UNICEF berusaha untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan pendidikan, perlindungan, kesehatan dan pembangunan untuk anak-anak yang hidup di jalanan. Pada tahun 2008 dan 2009, 5000 anak-anak akan mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek di 16 wilayah pusat dan 60 sekolah terbuka.

²⁰ UNICEF. *BANGLADESH .ibid.*, Hal. 12

²¹ *Ibid.*, hal.14

c. Nations Development Program (UNDP)

United Nations Development Programme (UNDP), memulai perjalanannya di Bangladesh pada tahun 1973. UNDP dan mitra-mitranya mencapai tujuannya dalam menggeluti bidang pemerintahan, pengentasan kemiskinan, perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana, serta sebagai pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Tahun 2011 juga menandai penutupan program UNDP 2006-2011. Selama periode ini, kemitraan antara pemerintah Bangladesh dan UNDP memiliki puluhan proyek yang dapat dilihat dari proyek yang digulirkan, mengemudi transformasional perubahan dalam kehidupan individu, masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Sepuluh transformasional hasil UNDP adalah organisasi pembangunan berbasis pengetahuan yang mendukung tujuan nasional dan tujuan internasional yang disepakati, termasuk tujuan pembangunan milenium.

Selama enam tahun terakhir, UNDP Bangladesh bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lainnya untuk mencapai hasil transformasional di bidang pengentasan kemiskinan, pemerintah yang demokratis dan perlindungan lingkungan serta manajemen bencana dan perubahan iklim. UNDP dalam penanggulangan kemiskinan menekankan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UNDP berusaha untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tidak membebani pertumbuhan Bangladesh, tetapi merupakan pusat dan elemen kontribusi di dalamnya. Caranya dengan memfasilitasi pembangunan dan pengurangan kemiskinan di Bukit Chittagong, UNDP juga mempromosikan perdamaian di wilayah-wilayah konflik. Dalam aspek demokratik, UNDP telah memupuk dan mendukung lembaga-lembaga dan proses yang adil dan pertanggungjawaban pemerintah yang memberikan kebutuhan pada warga biasa, khususnya masyarakat miskin.

UNDP telah mendukung Bangladesh dalam pengembangan lingkungan yang merupakan solusi terhadap ancaman ini. Proyek UNDP yang berlabuh di Pemerintah dan lembaga-lembaga independen dan hasil prestasi berasal dari kerjasama yang erat dengan para donor, adik dari lembaga PBB, LSM, dan sektor swasta.

d. The United Nations Population Fund (UNFPA)

The United Nations Population Fund (UNFPA) merupakan sebuah lembaga yang memberikan dunia dimana setiap kehamilan diinginkan, setiap kelahiran aman, potensi setiap orang muda terpenuhi.²² Tujuan UNFPA ialah mencapai akses universal terhadap kesehatan reproduksi dan seksual termasuk keluarga berencana, mempromosikan hak-hak reproduksi, menurunkan angka kematian ibu dan mempercepat kemajuan dalam agenda ICPD dan MDG 5 yang terkait erat. UNFPA juga berfokus pada meningkatkan kehidupan pemuda dan wanita dengan melakukan advokasi hak asasi manusia dan kesetaraan gender dan mempromosikan pemahaman dinamika populasi. Dinamika populasi itu termasuk tingkat pertumbuhan, struktur umur, fertilitas dan moralitas dan migrasi yang berpengaruh pada setiap aspek kemajuan manusia, sosial dan ekonomi. Kesehatan seksual dan reproduksi dan pemberdayaan perempuan semua kuat dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tren penduduk.

²² UNFPA. Diakses dari : <http://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/about;jsessionid=9175BA4111276C69D479BB0FE7E1FF82.jahia01> pada tanggal 09/09/2013.

UNFPA mendukung pemerintah dalam tugas-tugas, termasuk sensus, survei, penelitian populasi, dan analisis yang berkaitan dengan pembangunan.²³ Bidang-bidang fokus utama termasuk migrasi, penuaan, perubahan iklim dan urbanisasi. UNFPA membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh siklus hidup perempuan dan pemuda. Hal ini meliputi keluarga berencana sukarela, persalinan yang aman dan perawatan pasca-natal, pencegahan aborsi dan manajemen konsekuensinya, pengobatan infeksi saluran reproduksi serta pencegahan, perawatan dan pengobatan infeksi menular oleh hubungan seksual, termasuk HIV. Informasi mengenai pendidikan dan konseling yang semestinya tentang seksualitas manusia dan kesehatan reproduksi. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perawatan bagi korban kekerasan dan tindakan lainnya untuk menghilangkan praktek-praktek tradisional yang merugikan. Pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk kemajuan pembangunan ditegaskan oleh inklusi sebagai salah satu tujuan pembangunan milenium. Bahkan, kesetaraan gender merupakan komponen utama dari semua MDGs dan sangat erat kaitannya bila dihubungkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir dan juga mengurangi penyebaran HIV.

UNFPA juga meningkatkan kesadaran kekuatan perempuan, kelemahan dan kebutuhan dalam berbagai situasi dan masalah, seperti keadaan darurat kemanusiaan, perubahan iklim dan migrasi. Ini merupakan pengakuan hak-hak, perspektif dan pengaruh laki-laki dan anak laki-laki dan berusaha untuk melibatkan mereka dalam mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan kesehatan reproduksi. Dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak reproduksi, merupakan inti dari kegiatan UNFPA. Pendekatan manusia peka budaya berbasis hak. Sebuah penekanan kuat pada hak asasi manusia, memajukan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak reproduksi, perempuan dan laki-laki membutuhkan kefasihan budaya yang cukup untuk UNFPA yang bekerja di beberapa bidang yang paling sensitif dan intim bagi eksistensi manusia, termasuk seksualitas, hubungan gender dan masalah penduduk. Sejak tahun 2002, UNFPA telah menekankan integrasi pendekatan peka budaya ke dalam program-programnya. Dengan demikian, ia telah bekerja sama dalam masyarakat dan agen-agen lokal perubahan, termasuk para pemimpin agama dan organisasi keagamaan. Kontribusi UNFPA terhadap respon global mengenai AIDS dapat dilihat dari mandatnya untuk mengurangi kemiskinan, menghilangkan ketidaksetaraan gender dan menjamin akses universal terhadap kesehatan reproduksi dan seksual. UNFPA memfokuskan respon terhadap pencegahan HIV di kalangan anak muda, perempuan dan kelompok marginal, termasuk dalam konteks pekerja seks. UNFPA memastikan bahwa pelayanan KB dan kesehatan ibu memenuhi kebutuhan perempuan yang hidup dengan HIV. Ini termasuk intervensi untuk mencegah transmisi ibu ke anak dan dukungan untuk rahasia tes HIV secara sukarela.

UNFPA juga bekerja dalam banyak konteks, termasuk situasi kemanusiaan dan pasca-konflik, menuju penghapusan kekerasan berbasis gender dan pencegahan HIV. Kondisi pengungsi Rohingya di Bangladesh dari tahun 2006-2010 sangat membutuhkan perhatian lebih. Para pengungsi Rohingya dapat ditemukan terutama di daerah terpencil dan miskin di negara Bangladesh. Tepatnya kamp-kamp pengungsi resmi Nayapara dan Kutupalong, yang dapat ditemukan dalam kabupaten Cox Bazar bagian timur-selatan Bangladesh. Adapun pejabat tertinggi yang mengatur dan bertanggung jawab dalam menangani kamp-kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazar ini adalah Komisaris Bantuan Pengungsi dan Repatriasi (RRRC). Setiap kamp juga memiliki *Camp-in-Charge* (CIC) di

²³ UNFPA. *Ibid.*,

utus oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi para pengungsi, memelihara hukum dan ketertiban untuk kegiatan perkemahan secara keseluruhan. Polisi juga di utus di kamp-kamp untuk penegakan keamanan di bawah pengawasan langsung dari CIC. Sedangkan peran kantor UNHCR adalah sebagai salah satu koordinasi dan perlindungan hak-hak para pengungsi.

Jumlah pengungsi tahun 2006 sampai 2010 di penampungan Nayapara dan Kutupalong mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2006 jumlah pengungsi di kedua tempat penampungan ialah 16.154 jiwa sedangkan di akhir tahun 2010 totalnya 29.016 jiwa. Ada dua kelompok yang diidentifikasi oleh UNHCR, yang pertama adalah Rohingya yang tidak resmi atau tinggal di sub-distrik Teknaf dan Ukhia, serta 200.000 orang Rohingya yang tinggal di luar kamp-kamp ini. Kelompok kedua telah diidentifikasi oleh badan UNHCR pada Januari 2010 sebagai pengungsi, akan tetapi pemerintah Bangladesh menganggap Rohingya berdokumen migran. Sejak tahun 2006 telah terjadi peningkatan yang cukup besar dalam kualitas penampungan di kedua kamp baik kamp Nayapara ataupun kamp Kutupalong. Meskipun sebagian pondok telah direhabilitasi namun privasi para pengungsi masih kurang dan terbilang suram. Seperti yang terjadi di tahun 1991 saat gelombang pengungsi kedua terjadi, sekitar 150.000 orang tewas oleh topan di Cox Bazar dan daerah ini juga dipengaruhi oleh proses jangka panjang naiknya permukaan air laut. Kemudian susahna pasokan air dan makanan menjadi masalah serius di penampungan. Air di kamp Nayapara dalam pasokan pendek karena kekurangan air tanah. Pada tahun 2007 dalam dokumen yang dikeluarkan oleh UNHCR diakui bahwa adanya kesenjangan yang terjadi dalam perlindungan pengungsi Rohingya antara lain²⁴:

1. Pemukulan istri dan penelantaran istri
2. Pemerkosaan dan kurangnya tempat penampungan yang aman bagi korban perkosaan
3. Pernikahan dini dan non-konsensual
4. Penahanan kehadiran ilegal
5. Pembatasan kebebasan bergerak
6. Pemerasan dan eksploitasi

Kekerasan yang terjadi di dalam Camp seperti kasus pemerkosaan telah sering mereka (Rohingya) melaporkan kepada pengurus kamp dan juga melaporkannya pada badan UNHCR yang bertugas, dan masalah itu dikesampingkan begitu saja. Dalam pasokan yang tak memadai tersebut sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan. Dimana dapat dilihat bahwa tingkat kesehatan anak-anak di tahun 2010, *Physicians for Human Rights* (PHR) atau sebuah organisasi HAM yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan bahwa tingkat malnutrisi akut pada anak di bawah usia lima tahun berada di atas 18 persen di beberapa pemukiman Rohingya terdaftar yang berada di Bangladesh melebihi "kritis" karena 15 persen merupakan ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).²⁵ Kedatangan para pengungsi Rohingya di negara Bangladesh menambah beban bagi pemerintah Bangladesh. Karena Bangladesh merupakan salah satu negara miskin dan negara yang padat penduduk. Lebih dari separuh *Gross Domestic Product* (GDP) adalah

²⁴ T.Morris, Angela Dan Ester. *States Of Denial. Loc.cit* (hal.13)

²⁵ Irin. *Bangladesh Aid Restrictions impact Rohingyas Analysis*. Diakses dari : <http://www.eurasia-review.com/2011/2013-bangladesh-aid-restrictions-impact-rohingyas-analysis/tanggal: 23/11/2013>

berasal dari sektor jasa, sebanyak 45% dihasilkan Bangladesh dari sektor pertanian dengan beras sebagai produk tunggal yang paling penting.²⁶ Secara riil pendapatan perkapita Bangladesh telah tumbuh 5,8% per tahun sejak tahun 1996 meskipun ketidak stabilan politik, infrastruktur yang buruk, korupsi, pasokan listrik yang tidak memadai, dan lambat pelaksanaan reformasi ekonomi.²⁷

Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan telah meningkat tiga persen pertahun tepatnya di Teknaf dan Ukhiya, dan tingkat pengangguran dan buta huruf terdapat lebih dari 50 persen serta tingkat kelahiran dan kekurangan gizi jauh diatas rata-rata nasional.²⁸ Meskipun negara Bangladesh mengalami sedikit kemajuan ekonomi, namun karena kepadatan penduduk yang lebih mengakibatkan negara Bangladesh tetap menjadi negara miskin yang sangat rawan pangan dan sulit dalam pemenuhan gizi terhadap masyarakat. Kondisi kemiskinan yang melanda negara Bangladesh ini mengakibatkan semakin melebarnya masalah yang dihadapi. Seperti yang terjadi pada tingkat kesehatan masyarakat penduduk Bangladesh sendiri dalam pemenuhan gizi.

Menurut WFP Rumah Tangga Ketahanan Pangan dan Gizi *Assessment* (2008-2009) 37 juta orang yang merupakan seperempat dari populasi berada dalam kondisi rawan pangan. Tingkat kekurangan gizi akut dan kronis global di antara anak di bawah umur 2 tahun di negara Bangladesh sangat mengkhawatirkan. Malnutrisi kronis, atau pengerdilan, tersebar luas sekitar 41 persen dari 16 juta anak-anak negara (Bangladesh Survei Demografi dan Kesehatan 2011 & HIEs 2010) Dua dari lima anak di bawah usia lima tahun sebanyak 7,8 juta tidak dapat berkembang ke potensi fisik dan mental mereka, efek yang berlangsung selama seumur hidup. Diketahui pula sebanyak 18 persen wanita yang kekurangan gizi akut, dan sekitar sepertiga dari remaja perempuan di Bangladesh menderita anemia. Pemenuhan gizi semakin diperparah dengan kondisi air bersih yang susah didapat akibat air yang terkontaminasi (kerusakan air dalam tanah) oleh beberapa kejadian bencana di Bangladesh. Hal ini menimbulkan beberapa macam penyakit seperti penyakit malaria dan demam berdarah. Kesehatan buruk yang dihadapi oleh masyarakat Bangladesh dapat menghambat beberapa aktifitas lain baik dalam segi pendidikan serta mendapatkan pekerjaan. Kehadiran pengungsi Rohingya juga menyebabkan banyak persoalan baru di tengah-tengah masyarakat Bangladesh. Seperti ancaman keamanan, dimana keamanan berarti dalam kamus Oxford keamanan adalah tindakan untuk melindungi negara, bangunan atau seseorang terhadap serangan, bahaya.²⁹ Karena hukum negara Bangladesh yang tidak mengatur hak-hak atas ribuan nasib pengungsian, hal ini menyebabkan kurang teraturnya para pengungsi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di dan di sekitar kamp. Beberapa interaksi yang dilakukan sebagian besar berdampak buruk pada masyarakat Bangladesh dan negara Bangladesh.

Simpulan

Pada akhir penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesa yang disampaikan pada awal penelitian sesuai dengan teori sekuritisasi yang digunakan dalam penelitian ini. Bila dilihat dari perspektif keamanan dan dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan yakni teori sekuritisasi maka kedatangan para pengungsi yang berkepanjangan dan

²⁶ CIA. *Bangladesh Economy 2013*. Diakses dari : http://www.theodora.com/Bangladesh_economy.html. tanggal.07/12/2013

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ T.Morris. UNHCR. *Op.Cit.*,hal.11

²⁹ Oxford Learner Pocket Dictionary New Edition. *Oxford Dictionary.Third Edition.*. hal.387

masih terus berlanjut menjadi ancaman terhadap kondisi sosio ekonomi setiap individu masyarakat setempat atau masyarakat lokal Bangladesh dan mengganggu stabilitas keamanan negara Bangladesh sendiri. Oleh karena itu pemerintah Bangladesh menolak program UNJI. Pemerintah awalnya memandang kedatangan Rohingya sebagai sebuah isu kemanusiaan dimana Rohingya merupakan korban dari kebijakan pemerintah Myanmar yang menurut Bangladesh memerlukan bantuan kemanusiaan. Setelah melihat aliran migrasi paksa para Rohingya tiada henti memasuki wilayah perbatasan Bangladesh, pemerintah Bangladesh mulai khawatir terhadap aliran migrasi internasional akan mengancam keamanan nasional negaranya.

Meskipun Bangladesh merupakan negara miskin dan padat penduduk serta negara Bangladesh bukanlah anggota penandatanganan Konvensi tahun 1951 mengenai status pengungsi serta protokol 1967, namun selama beberapa dekade pemerintah Bangladesh telah melakukan banyak pertolongan kepada para pengungsi sebagai alasan kemanusiaan. Untuk mengurangi ketegangan dan mengatur masalah kepengungsian yang terus berlanjut di negara Bangladesh ini, pemerintah Bangladesh melakukan hubungan kerjasama dengan beberapa Organisasi Internasional. Tahun 2006 UNHCR meluncurkan program UNJI untuk menangani kasus pengungsi Rohingya. Namun pada Januari 2011 pemerintah Bangladesh mengambil keputusan untuk menolak bantuan dari UNJI. Penolakan bantuan UNJI ini timbul berdasarkan berbagai macam persepsi pemerintah Bangladesh. Karena UNJI dianggap hanya memberikan keuntungan pada pengungsi saja. Segala bantuan mengarah pada pengungsi, dan tidak memperhatikan dampak yang timbul pada masyarakat lokal. Program-program yang dilaksanakan oleh UNJI mengarah pada faktor umpan tarik atau penambahan minat orang-orang Rohingya datang kembali untuk menjadi pengungsi di Bangladesh. Dapat dilihat dari jumlah populasi pengungsi yang semakin meningkat di tiap tahunnya mulai 2006 sampai 2010. Mengakibatkan sudut pandang pemerintah Bangladesh dalam memandang pengungsi Rohingya terhadap krisis tidak lagi menjadi tragedi kemanusiaan yang sederhana, melainkan merupakan potensi ancaman stabilitas dalam negeri Bangladesh dan sumber ketegangan antarnegara antara negara Myanmar dan Bangladesh. Dimana kehidupan sosial masyarakat Bangladesh juga menjadi perlu diperhatikan. Meskipun penolakan terhadap UNJI dilakukan, perlu diingat Bangladesh tetaplah negara yang telah banyak membantu kaum etnis Rohingya dari kekejaman militer Myanmar. Namun dilihat dari kenyataannya setelah suatu negara melakukan kerjasama dengan sebuah Organisasi Internasional ternyata belum bisa memecahkan masalah yang ada di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara*, Cet.5, Jakarta, Bumi Aksara, 2008

Proudfoot, Malcom J. *European Refugee: 1935-52 A Study in Forced Migration Movement*. London: Faber & faber Ltd. 1957

Oxford Learner Pocket Dictionary New Edition. *Oxford Dictionary.Third Edition*.

JURNAL :

K. C. Saha, *Learning From Rohingya Refugee: Repatriation To Myanmar*: vol.19, no. 3. Tahun 2001.

LAPORAN :

Kaladan Pers, *Bangladesh disallows 33-million dollar UN Rohingya Project*. <<http://www.kaladanpress.org/news/134-news-2011/april-2011/3161-bangladesh-disallows-33-million-dollar-un-rohingya-project>> diakses pada 08/05/2013

IRIN ASIA, *HUMANITARIAN NEWS AND ANALYSIS. Analysis: How Bangladesh Aid Restrictions Impact Rohingyas*, IRIN News. <<http://www.irinnews.org/report/99157/analysis-how-bangladesh-aid-restrictions-impact-rohingyas>> diakses pada 20/11/2013

Médecins Sans Frontières-Holland., *10 Years For The Rohingya Refugees In Bangladesh: Past, Present And Future*, 2002. <http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2002/rohingya_report.pdf> diakses pada 27/03/2013.

T.Morris, Angela Dan Ester, 2011, *States Of Denial : A Review Of Unhcr's Response To The Protected Situation Of Stateless Rohingya Refugees In Banglades*. Switzerland. <[Http://Www.Unhcr.Org/4ee754c19 .Pdf](Http://Www.Unhcr.Org/4ee754c19.Pdf)> diakses pada 27/11/2012.

UNFPA. <http://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/about.jsessio_nid=9175BA411127_6_C69D479BB0FE7E1FF82.jahia01> diakses pada 09/09/2013

UNHCR, *UNHCR CONVENTION AND PROTOCOL: Relating To The Status Of Refugees*. UNHCR. <<http://www.unhcr.org/3b66c2aa10/pdf>> diakses pada 17/02/2013

UNHCR, *STATUTE Of United Nations High Commissioner For Refugees*, UNHCR. <<http://www.unhcr.org/3b66c39e1.html>> diakses pada 20/03/2013

UNICEF, *BANGLADESH*, UNICEF, 2008. <www.unicef.org/bangladesh/cbg_pdf> diakses pada 08/05/2013

WFP, *WFP/UNHCR REPORT OF THE JOINT ASSESSMENT MISSION BANGLADESH: 10 TO 17 OCTOBER 2004*, 2004. <<http://www.wfp.org/about>> diakses pada 11/08/2013

Central Intelligence Agency, *South Asia Bangladesh*. CIA. <<Https://Www.Cia.Gov/Library/Publications/The-World-Factbook/Geos/Bm.Html>> diakses pada 25/04/2013

CIA The World Factbook - *Burma*. <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html>> diakses pada 14/02/2013